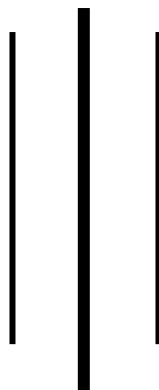




**LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH KOTA
PEMATANGSIANTAR**

**DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN
PERMUKIMAN KOTA PEMATANGSIANTAR
TAHUN 2024**

**PROVINSI SUMATERA UTARA
KOTA PEMATANGSIANTAR**



**PEMATANGSIANTAR
TAHUN 2025**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas perlindungan-Nya dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Pematangsiantar Tahun Anggaran 2024.

Sehubungan dengan telah berakhirnya Tahun Anggaran 2024 maka OPD Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Pematangsiantar dengan ini menyampaikan beberapa laporan, yaitu :

1. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Pematang Siantar Tahun 2024;
2. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Pematang Siantar Tahun 2024;
3. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pemerintah Kota Pematang Siantar Tahun 2024.

Laporan ini disusun mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kota Pematang Siantar Tahun 2022-2027 dan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Kota Pematang Siantar Tahun 2022.

Kiranya laporan ini dapat menjadi masukan bagi Ibu Wali Kota Pematangsiantar dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) Daerah Kota Pematangsiantar Tahun Anggaran 2024.

Pematangsiantar,

2025

KEPALA DINAS



Ir. Christina Risfani Sidauruk

Pembina

NIP. 19681227 199402 2 002

DAFTAR ISI

| | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Halaman Judul | i |
| Kata Pengantar | ii |
| Daftar Isi | iii |
| | |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1.PENJELASAN UMUM ORGANISASI | 1 |
| 1.2.ASPEK STRATEGIS ORGANISASI | 1 |
| 1.2.1. Tujuan dan Fungsi Organisasi | 1 |
| 1.3.PERMASALAHAN UMUM (ISU STRATEGIS) | 4 |
| | |
| BAB II. PERENCANAAN KINERJA | 5 |
| 2.1.IKTISAR PERJANJIAN KINERJA | 5 |
| 1. Tabel 2.1.1.Perjanjian Kinerja tahun 2024 kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Pematangsiantar..... | 5 |
| 2.2.INDIKATOR KINERJA UTAMA | 6 |
| 2. Tabel 2.2.1.Indikator Kinerja Utama Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Pematangsiantar | 7 |
| | |
| BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA..... | 9 |
| 3.1.CAPAIAN KINERJA ORGANISASI | 9 |
| 3.1.1. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahunan | 10 |
| 1. Tabel 3.1.1.1 Perbandingan Antara Target dan Realisaasi Kinerja Tahun ini..... | 10 |
| 3.1.2. Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun ini dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir | 11 |
| 1. Tabel 3.1.2.1 Capaian Indikator Kinerja Meningkatnya Persentase Capaian SPM Bidang PKP dan PUPR | 11 |

| | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 2. Tabel 3.1.2.2.Capaian Indikator Terwujudnya Kawasan Perumahan dan Permukiman yang Berkualitas | 11 |
| 3.1.3. Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun ini dengan Target Jangka Menengah yang terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis Nasional..... | 12 |
| 3.1.4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Target Jangka Menengah Daerah | 12 |
| 1. Tabel 3.1.4.1. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Target RPJM di Dalam Renstra | 13 |
| 2. Tabel 3.1.4.2. Persentase Ketersediaan Rumah Layak Huni .. | 14 |
| 3. Tabel 3.1.4.3. Persentase rumah warga Negara korban Bencana yang Memperoleh rumah Layak Huni dan persentase rumah warga Negara yang Terkena Relokasi akibat Program Pemerintah Daerah Kab/ Kota yang memperoleh Pasilitas Penyediaan rumah Layak Huni | 15 |
| 4. Tabel 3.1.4.4. Persentase rumah yang terlayani sarana prasarana air limbah domestik..... | 15 |
| 5. Tabel 3.1.4.5. Meningkatnya sarana prasarana pelayanan air bersih..... | 16 |
| 6. Tabel 3.1.4.6. Meningkatnya kualitas kawasan permukiman..... | 16 |
| 7. Tabel 3.1.4.7. Tersedianya sarana prasarana utilitas umum (PSU) | 17 |
| 3.1.5. Analisa Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Kinerja serta Akternative Solusi yang telah dilakukan | 17 |
| 1. Tabel 3.1.5.1. Persentase ketersediaan rumah layak huni..... | 18 |
| 2. Tabel 3.1.5.2. Persentase rumah warga Negara korban Bencana yang Memperoleh rumah Layak Huni dan persentase rumah warga Negara yang Terkena Relokasi | |

| | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| akibat Program Pemerintah Daerah Kab/ Kota yang memperoleh Pasilitas Penyediaan rumah Layak Huni | 18 |
| 3. Tabel 3.1.5.3. Persentase rumah yang terlayani sarana prasarana air limbah domestik..... | 19 |
| 4. Tabel 3.1.5.4. Meningkatnya sarana prasarana pelayanan air bersih..... | 19 |
| 5. Tabel 3.1.5.5. Meningkatnya Kualitas Kawasan Permukiman | 20 |
| 6. Tabel 3.1.5.6. Tersedianya sarana prasarana utilitas umum (PSU) | 20 |
| 3.1.6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya..... | 21 |
| 1. Tabel 3.1.6.1. Realisasi Program Per Indikator Kinerja | 22 |
| 2. Tabel 3.1.6.2. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Anggaran..... | 24 |
| 3. Tabel 3.1.6.3. Efisiensi Per Indikator Kinerja..... | 26 |
| 3.1.7. Analisis Program/ Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja | 27 |
| 3.2. REALISASI ANGGARAN | 28 |
| 1. Tabel 3.2.1. Realisasi Anggaran Program/ Kegiatan Serta Realisasi Anggaran | 29 |
| BAB IV. PENUTUP | 34 |
| A. Kesimpulan..... | 34 |
| B. Saran..... | 34 |

BAB I PENDAHULUAN

1.1. PENJELASAN UMUM ORGANISASI

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Pematangsiantar dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Pematangsiantar yang telah di rubah dengan Peraturan Wali K3.ota No. 27 Tahun 2022 Tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Pematangsiantar undang-undang no 25 Tahun 2024 tentang Kota Pematangsiantar di Provinsi Sumatera Utara, peraturan Mentri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Repiblik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Wali Kota Pematangsiantar Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Perintah, Keputusan Wali Kota Pematangsiantar Nomor 001/900.1.11/1007/II-2025 tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Resiko Inspektorat Daerah Kota Pematangsiantar TA.2025 dan Peraturan Wali Kota Pematangsiantar Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas – Dinas Daerah Kota Pematangsiantar yang telah di rubah dengan Peraturan Wali Kota Pematangsiantar Nomor 01 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Pematangsiantar Nomor 04 Tahun 2017 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas - Dinas Daerah Kota Pematangsiantar.

1.2. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI

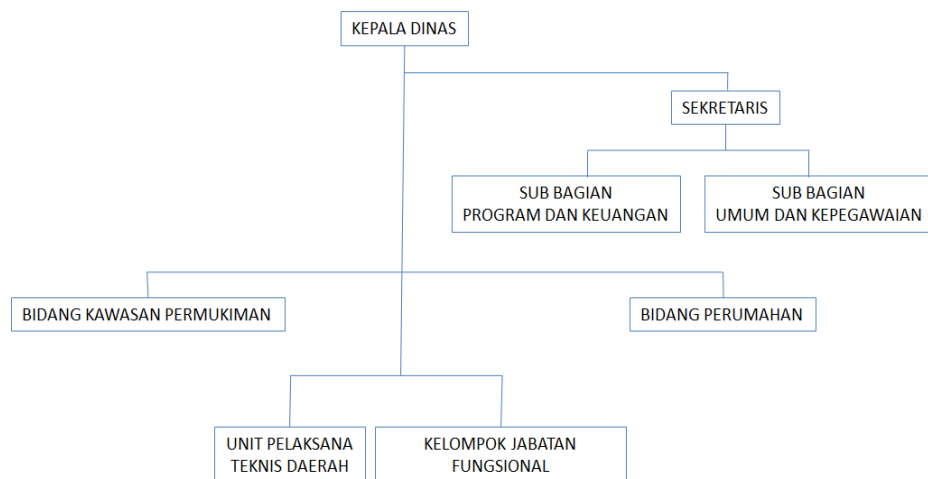
1.2.1. Tugas dan Fungsi Organisasi

Organisasi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman terdiri dari:

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat terdiri atas ;
 - a. Sub Bagian Program dan Keuangan; dan
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
3. Bidang Kawasan Permukiman terdiri atas ;

4. Bidang Perumahan terdiri dari ;
5. UPTD;
 - a. Kepala UPTD PALD;
 - b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Penelaah Penyehatan Lingkungan Permukiman;
 - d. Operator Teknologi Informasi Komputer;
6. Kelompok JF.

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA PEMATANGSIANTAR



Sumber : Perwa No 27 Tahun 2022

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Pematangsiantar sampai dengan 31 Desember 2024 mempunyai 97 orang pegawai yang terdiri dari 54 PNS dan 43 honorer.

Kualifikasi pendidikan PNS Pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Pematangsiantar adalah sebagai tabel dibawah ini :

| No | Uraian | PNS (orang) |
|----|------------|-------------|
| 1 | S2 | 7 |
| 2 | S1 | 23 |
| 3 | D3 | 23 |
| 4 | SLTA / SMA | 17 |
| 5 | SLTP | 3 |

| | | |
|---|-----------|----|
| 6 | SD | 1 |
| | Jumlah... | 54 |

Kualifikasi pendidikan THL Pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Pematangsiantar adalah sebagai tabel dibawah ini :

| No | Uraian | PNS (orang) |
|----|--------------------|-------------|
| 1 | S2 | - |
| 2 | S1 | 7 |
| 3 | D3 | 5 |
| 4 | SLTA / SMA | 23 |
| 5 | SLTP | 1 |
| 6 | SD | 3 |
| | Tidak Sekolah | 4 |
| | Jumlah..... | 43 |

Dalam menyelenggarakan tugas kelembagaan, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Pematangsiantar mempunyai fungsi di bidang perumahan yaitu :

a. Tugas dan Fungsi

- 1) Menyusun dan menyediakan basis data perumahan dan kawasan permukiman;
- 2) Menyusun dan menyempurnakan peraturan perundang-undangan bidang perumahan dan kawasan permukiman;
- 3) Pemberdayaan pemangku kepentingan dan masyarakat dalam bidang perumahan dan kawasan permukiman;
- 4) Melaksanakan sinkronisasi dan sosialisasi peraturan perundang-undangan serta kebijakan dan strategi penyelenggaraan perumahan dan Kawasan permukiman;
- 5) Menyediakan prasarana dan sarana pembangunan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah;

- 6) Penyediaan pasilitas kerja sama pada tingkat kota antara pemerintah kota dan badan hukum dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman;
- 7) Penetapan lokasi perumahan dan permukiman sebagai perumahan kumuh dan permukiman kumuh pada tingkat kota;
- 8) Penyediaan pasilitas peningkatan kualiat terhadap perumahan kumuh dan perukiman kumuh; dan
- 9) Pelaksanaan tugas lain yang di berikah oleh Wali Kota terkait tugas dan fungsinya.

1.3. PERMASALAHAN UMUM (ISU STRATEGIS)

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Pematangsiantar menghadapi permasalahan dan hambatan sehingga berdampak terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, antara lain :

1. Ketidakseuaian ketersediaan anggaran dengan prioritas kegiatan;
2. Adanya perubahan regulasi yang menyebabkan tertundanya atau tidak terlaksananya suatu kegiatan;
3. Ketidaksesuaiannya antara tugas dan fungsi dinas dengan Permendagri 18 Tahun 2020 tentang Peraturan dan Pelaksanaan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Standar Pelayanan Minimum (SPM) Nasional; dan
4. Kurangnya sumber daya manusia (SDM) pada dinas perumahan dan kawasan permukiman sehingga menghambat visi dan misi kepala daerah.

Dari permasalahan tersebut diatas, dapat dirumuskan program dan kegiatan prioritas yang mendorong terpenuhinya target renstra tahun berikutnya. Adapun isu – isu penting lainnya terkait Standar Pelayanan Minimum (SPM) antara lain :

- a. Tidak maksimalnya realisasi jenis pelayanan dasar penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana
- b. Tidak maksimalnya realisasi fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah
- c. Masih rendahnya jumlah rumah yang mendapat layanan pengelolaan Lumpur Tinja Domestik/SPALDS
- d. Masih minimnya reahabilitasi rumah tidak layak huni di Kota Pematangsiantar.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. IKHTISAR PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja sebagaimana dimaksud pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas laporan Kinerja Instansi Pemerintah, adalah Dokumen Perjanjian Kinerja yang merupakan suatu dokumen yang menyajikan Pernyataan Kinerja/ Kesepakatan Kinerja/ Perjanjian Kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan Target Kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh Instansi Pemerintah.

Adapun Perjanjian Kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Pematangsiantar Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

SKPD : Dinas Perumahan dan Kawasan
Permukiman
Tahun Anggaran : 2024

Tabel 2.1.1. Perjanjian Kinerja tahun 2024 kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Pematangsiantar

| NO. | SASARAN STRATEGIS | | INDIKATOR KERJA | TARGET |
|------------|-----------------------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1 | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah | 1 | Nilai AKIP Perangkat Daerah | B |
| | | 2 | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | 80 |
| | | 3 | Inovasi | 1 |
| 2 | Meningkatnya jumlah rumah layak huni | 1 | Persentase ketersediaan rumah layak huni | 83,39% |
| | | 2 | Persentase rumah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni dan Persentase rumah warga negara yang terkena relokasi | 100% |

| | | | | |
|---|-------------------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| | | | akibat program pemerintah daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni | |
| 3 | Meningkatnya sarana prasarana pelayanan air limbah domestik | 1 | Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses layanan air limbah domestik layak | 100 % |
| 4 | Meningkatnya sarana prasarana pelayanan air bersih | 1 | Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses layanan air minum layak | 100 % |
| 5 | Meningkatnya kualitas kawasan permukiman | 1 | Berkurangnya luasan kawasan kumuh/ berkurangnya RTLH | 10 Ha |
| 6 | Tersedianya sarana prasarana utilitas umum (PSU) | 1 | Persentase tersedianya Prasarana Sarana Utilitas Umum | 70 % |

2.2. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator Kinerja Utama, Sasaran Strategis yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Pematangsiantar Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Tabel 2.2 berikut :

Tabel 2.2.1. Indikator Kinerja Utama Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Pematangsiantar

| No. | Sasaran | Indikator Kinerja Utama/ Indikator Kinerja Kunci | Formula/Rumus Perhitungan Capaian IKU | Sumber Data |
|-----|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1. | Terlaksananya SPM Bidang Perumahan | Persentase rumah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni | $\frac{\text{Jumlah unit rumah korban bencana yang ditangani pada tahun n}}{\text{Jumlah total rencana unit rumah korban bencana yang akan ditangani pada tahun n}} \times 100\%$ | PKP |
| | | Persentase rumah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/ kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni | $\frac{\text{Rumah tangga penerima fasilitas penggantian hak atas penguasaan tanah dan/ atau bangunan + rumah tangga penerima subsidi uang sewa + rumah tangga penerima penyediaan rumah layak huni}}{\text{Jumlah total rumah tangga terkena relokasi program pemerintah daerah yang memenuhi kriteria penerima layanan}} \times 100\%$ | |
| 2. | Terlaksananya SPM Bidang Perumahan | Persentase rumah yang terlayani sarana prasarana air limbah Domestik | $\frac{\text{Jumlah rumah yang terlayani sarana prasarana air limbah Domestik}}{\text{Jumlah total rumah}} \times 100\%$ | |
| | | Persentase rumah yang terlayani sarana prasarana air bersih | $\frac{\text{Jumlah rumah tangga yang terlayani sarana prasarana air bersih}}{\text{Jumlah total rumah tangga}} \times 100\%$ | |

| | | | | |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 3. | Meningkatnya kualitas kawasan permukiman | Berkurangnya luasan kawasan kumuh | Total luasan kawasan kumuh – jumlah luasan kawasan kumuh yang tertangani | |
| 4. | Meningkatnya jumlah rumah layak huni bagi masyarakat yang Berpenghasilan Rendah (MBR) | Persentase peningkatan jumlah Rumah Layak Huni | <p>Jumlah rumah tidak layak huni yang ditangani</p> <p>_____ X 100%</p> <p>Jumlah Total rumah tidak layak huni</p> | |
| 5. | Tersedianya Prasarana Sarana Utilitas (PSU) | Persentase Jalan Lingkungan dalam Keadaan Baik | <p>Panjang Jalan Lingkungan yang Terbangun</p> <p>_____ X 100</p> <p>Panjang Jalan Lingkungan yang Direncanakan</p> | |
| | | Persentase Drainase Lingkungan dalam Keadaan Baik | <p>Panjang Drainase Lingkungan yang Terbangun</p> <p>_____ X 100</p> <p>Panjang Drainase yang Direncanakan</p> | |
| | | Persentase LPJU dalam Keadaan Baik | <p>Jumlah Titik LPJU yang Terpasang</p> <p>_____ X 100</p> <p>Jumlah Titik LPJU yang Direncanakan</p> | |
| | | Persentase Taman Kota dalam Keadaan Baik | <p>Jumlah Taman Kota yang Dipelihara</p> <p>_____ X 100</p> <p>Jumlah Total Taman Kota</p> | |

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja merupakan perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik. Uraian akuntabilitas kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Pematangsiantar Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

3.1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Mengacu pada ketentuan yang berlaku Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pematangsiantar diukur berdasarkan tingkat pencapaian kinerja sasaran, program/kegiatan serta Indikator Makro.

Untuk mengetahui gambaran mengenai tingkat pencapaian kinerja sasaran, dilakukan pengukuran melalui media rencana kinerja yang kemudian dibandingkan dengan realisasinya yang disajikan dalam formulir Pengukuran Kinerja (PK). Sedangkan pencapaian Kinerja Program/Kegiatan diperoleh dengan membandingkan target dengan realisasi indikator kinerja kegiatan yang terdiri dari masukan (*Inputs*), keluaran (*Outputs*), hasil (*Outcomes*) dan pencapaian indikator makro dilakukan dengan membandingkan target dengan realisasi indikator makro.

Analisis capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasinya pada tahun yang bersangkutan, pada tahun lalu, sampai dengan tahun ini serta membandingkannya dengan standar nasional dan menguraikan program/kegiatan yang dilakukan dalam rangka mencapai target kinerja tersebut serta faktor-faktor yang menjadi penyebab keberhasilan maupun kegagalannya. Di bawah ini diuraikan capaian kinerja atas pencapaian indikator kinerjanya pada tahun 2024.

3.1.1. Perbandingan Antara Target Dan Realisasi Kinerja Tahun Ini

Hasil Pengukuran Kinerja, Indikator Kinerja Utama, Sasaran Strategis yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Pematangsiantar Tahun 2024. Presentase capaian setiap indikator untuk angka target yang tinggi yaitu realisasi tahun 2024 dibandingkan dengan target tahun 2024 dikalikan dengan 100%. Sedangkan presentase capaian indikator untuk angka target yang rendah yaitu target tahun 2024 dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 dikalikan dengan 100% sebagaimana tercantum dalam table 3.1.1.1 berikut :

Table 3.1.1.1 Perbandingan Antara Target Dan Realisasi Kinerja Tahun Ini

| No | INDIKATOR KERJA | TARGET | REALISASI |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|
| 1 | Nilai AKIP Perangkat Daerah | B | B |
| 2 | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | 80 | 83,03 |
| 3 | Inovasi | 1 | 1 |
| 4 | Persentase ketersediaan rumah layak huni | 83,39 Ha | 83,39 Ha |
| 5 | Persentase rumah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni dan Persentase rumah warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni | 100% | 100% |
| 6 | Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses layanan air limbah domestik layak | 100 % | 100% |
| 7 | Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses layanan air minum layak | 100 % | 0 |
| 8 | Berkurangnya luasan kawasan kumuh/ berkurangnya RTLH | 10 Ha | 0 |
| 9 | Persentase tersedianya Prasarana Sarana Utilitas Umum | 70 % | 70% |

3.1.2. Perbandingan antara Realisasi kinerja serta Capaian Kinerja Tahun ini dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Indikator Kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan pencapaian Sasaran Strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Pematangsiantar terdiri dari Indikator Kinerja Utama dengan capaian kinerja sebagaimana berikut ini:

a. Meningkatnya Persentase Capaian SPM Bidang PKP dan PUPR

Tabel 3.1.2.1. Capaian Indikator Kinerja Meningkatnya Persentase Capaian SPM Bidang PKP dan PUPR

| No | Indikator Kinerja | Tareget 2024 | Realisasi 2024 | Realisasi 2023 | Realisasi 2022 |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|----------------|----------------|
| 1 | Persentase rumah warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni | 100% | 100% | 100% | 0% |
| 2 | Persentase rumah warga Negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah Kab/ Kota yang memperoleh pasilitas penyediaan rumah yang layak huni | - | - | - | - |
| 3 | Cakupan layanan air bersih | 100% | 0% | 0% | 0% |
| 4 | Jumlah rumah dan bangunan yang memiliki septic tank yang memenuhi standart/ Persentase rumah tangga yang terlayani Sarana Prasarana Air Limbah Domestik | 100% | 79,62% | 100% | 100% |
| 5 | Cakupan ketersediaan rumah layak huni dan memenuhi standart kesehatan | 83,39% | 83,39% | 83,53% | 82,29% |

b. Meningkatnya Kualitas Permukiman yang Berkualitas

Tabel. 3.1.2.2. Capaian Indikator Terwujudnya Kawasan Perumahan dan Permukiman yang Berkualitas

| Indikator Kinerja | Tahun 2022 | | | Tahun 2023 | | | Tahun 2024 | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|---------|------------|-----------|---------|------------|-----------|---------|
| | Target | Realisasi | Capaian | Target | Realisasi | Capaian | Target | Realisasi | Capaian |
| 1. Meningkatnya kualitas kawasan permukiman kumuh di bawah 10 (Sepuluh) Ha dengan perbaikan rumah | - | - | - | 100 Unit | 0 | 0% | 100 Unit | 0 | 0% |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|------|----------|----------|------|----------|----------|--------|
| tidak layak huni | | | | | | | | | |
| 2. Pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh pada Kab/ Kota melalui perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk mencegah Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh | 10 Unit | 10 Unit | 100% | 10 Unit | 35 Unit | 350% | 10 Unit | 29 Unit | 290% |
| 3. Berkurangnya luasan kawasan kumuh/ berkurangnya RTLH | - | - | - | 10 Ha | 0 | 0 | 10 Ha | 0 | 0 |
| 4. Tersedianya Prasarana, sarana dan utilitas umum di perumahan untuk menunjang fungsi hunian | - | - | - | 7 Lokasi | 7 Lokasi | 100% | 7 Lokasi | 3 Lokasi | 42,87% |

3.1.3. Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun ini dengan Target Jangka Menengah yang terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis Nasional

Pada tahun 2024 Dinas Perumahan dan Kawasan Perumahan Kota Pematangsiantar Tidak memiliki Perencanaan Strategis Nasional.

3.1.4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Target Jangka Menengah Daerah

Perbandingan realisasi indikator kinerja pada Tahun 2024 dengan Target RPJMD didalam Renstra di jabarkan pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.1.4.1. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Target RPJM di Dalam Renstra

| No | Indikator Kinerja | Target Jangka Menengah | | | | | Realisasi Kinerja | | |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------|------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|
| | | Tahun 2020 | Tahun 2021 | Tahun 2022 | Tahun 2023 | Tahun 2024 | Tahun 2022 | Tahun 2023 | Tahun 2024 |
| 1. | Persentase jumlah rumah korban bencana Kab/ Kota yang terrehabilitasi | - | - | 99,85% | 100% | 100% | - | 100% | 100% |
| 2. | Jumlah rumah dan bangunan yang memiliki septic tank yang memenuhi standart/ jumlah rumah tangga yank tersambung dengan system pengolahan air limbah terpusat skala permukiman | 92,49 % | 96,25 % | 100% | 252 rumah tangga | 252 rumah tangga | 100% | 684 rumah tangga | 550 rumah tangga |
| 3. | Cakupan ketersediaan rumah layak huni dan memenuhi standart kesehatan/ Persentase Rumah Layak Huni | 97,36 % | 99,18 % | 100% | 82,29 % | 83,39% | 100% | 83,53% | 83,39% |
| 4. | Rasio rumah tangga menggunakan air bersih/ Persentase Rumah Yang Terlayani Sarana Prasarana Air Bersih | 99,06 % | 99,53 % | 100% | 99,85 % | 100% | 0% | 0% | 0% |
| 5. | Berkurangnya luasan kawasan kumuh | - | - | - | 10 Ha | | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Persentase Sarana Prasarana dan Utilitas Umum | 57% | 60% | 70% | 60% | 70% | 70% | 70% | 70% |

Dokumen perjanjian kinerja tahun 2024 dilakukan pengukuran dengan membandingkan target dan realisasi yang telah dicapai. Kemudian hasil pengukuran kinerja tersebut dilakukan evaluasi dan analisa kinerja. Hal ini berguna untuk mengetahui keberhasilan maupun ketidakberhasilan pencapaian sasaran strategis.

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Pematangsiantar ada 5 Sasaran Strategis yang akan dicapai di tahun 2024 ini. Adapun 5 Sasaran Strategis tersebut sebagai berikut:

- a. Sasaran Strategis 1 “Meningkatnya jumlah rumah layak huni”, dengan indikator kinerja sebagai berikut :

1) Persentase ketersediaan rumah layak huni.

Capaian indikator persentase ketersediaan rumah layak huni pada tahun 2023 mempunyai target sebesar 82,29% dengan realisasi yang di capai 83,53% dan pada tahun 2024 dengan target sebesar 83,39% dengan capaian realisasi sebesar 83,39%.

Tabel 3.1.4.2. Persentase ketersediaan rumah layak huni

| Indikator Kinerja | Tahun 2023 | | | Tahun 2024 | | |
|------------------------------------------|------------|-----------|---------|------------|-----------|---------|
| | Target | Realisasi | Capaian | Target | Realisasi | Capaian |
| Persentase ketersediaan rumah layak huni | 82,29% | 83,53% | 101,51% | 83,39% | 83,39% | 100% |

2) Persentase rumah warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni dan persentase rumah warga Negara yang terkena relokasi akibat program pemerintahan daerah kab/ kota yang memperoleh pasilitas penyediaan rumah yang layak huni

Capaian indikator persentase rumah warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni dan persentase rumah warga Negara yang terkena relokasi akibat program pemerintahan daerah kab/ kota yang memperoleh pasilitas penyediaan rumah yang layak huni pada tahun 2023 mempunyai target sebesar 100% dengan realisasi yang di capai 100%, disebabkan pada tahun 2023 dan pada tahun 2024 dengan target sebesar 100%

dengan capaian realisasi sebesar 100% disebabkan seluruh rumah yang terdampak bencana alam pada tahun 2024 telah mendapatkan bantuan rumah layak huni.

Tabel 3.1.4.3. Persentase rumah warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni dan persentase rumah warga Negara yang terkena relokasi akibat program pemerintahan daerah kab/ kota yang memperoleh pasilitas penyediaan rumah yang layak huni.

| Indikator Kinerja | Tahun 2023 | | | Tahun 2024 | | |
|---------------------------------------------------|------------|-----------|---------|------------|-----------|---------|
| | Target | Realisasi | Capaian | Target | Realisasi | Capaian |
| Persentase rehabilitasi rumah bagi korban bencana | 100% | 100% | 100 % | 100% | 100% | 100% |

b. Sasaran Strategis 2 “Meningkatnya sarana prasarana pelayanan air limbah domestik”, memiliki indikator kinerja sebagai berikut :

- 1) Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses layanan air limbah domestik layak

Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses layanan air limbah domestik layak pada tahun 2023 mempunyai target 100% dengan realisasi 100% dan pada tahun 2024 dengan target 100% dengan realisasi 100%.

Tabel 3.1.4.4. Persentase rumah yang terlayani sarana prasarana air limbah domestik

| Indikator Kinerja | Tahun 2023 | | | Tahun 2024 | | |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|---------|------------|-----------|---------|
| | Target | Realisasi | Capaian | Target | Realisasi | Capaian |
| Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses layanan air limbah domestik layak | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |

c. Sasaran Strategis 3 “Meningkatnya sarana prasarana pelayanan air bersih”, ”, memiliki indikator kinerja sebagai berikut :

- 1) Persentase rumah yang terlayani sarana prasarana air bersih pada tahun 2023 mempunyai target 100% dengan realisasi capaian 0% dan pada tahun 2024 100% dengan capaian realisasi 100%. Target tersebut tidak tercapai karena keterbatasan anggaran dinas, sementara kota pematangsiantar tidak mendapat Dana Alokasi Khusus (DAK) dari kementerian terkait.

Tabel 3.1.4.5. Meningkatkan sarana prasarana pelayanan air bersih

| Indikator Kinerja | Tahun 2023 | | | Tahun 2024 | | |
|----------------------------------------------------|------------|-----------|---------|------------|-----------|---------|
| | Target | Realisasi | Capaian | Target | Realisasi | Capaian |
| Meningkatnya sarana prasarana pelayanan air bersih | 100% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% |

d. Sasaran Strategis 4 “Meningkatnya kualitas kawasan permukiman”, dengan indikator kinerja sebagai berikut ini:

- 1) Berkurangnya luasan kawasan kumuh/ berkurangnya RTLH. Pada tahun 2023 dinas perumahan dan kawasan permukiman tidak memiliki indikator kinerja ini sedangkan pada tahun 2024 mempunyai target berkurangnya luasan kawasan kumuh sebesar 10 Ha. Namun dinas perumahan dan kawasan permukiman tidak dapat menghitung capaian tersebut dikarenakan terdapat beberapa indikator dalam penuntasan kawasan kumuh yang tidak menjadi kewenangan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman antara lain Persampahan dan Penyediaan Hidran untuk Pemadam Kebakaran, sehingga capaian kinerjanya diintervensi dari berkurangnya rumah tidak layak huni (RTLH) di kota pematangsiantar yaitu sebanyak 29 Unit.

Tabel 3.1.4.6. Meningkatkan kualitas kawasan permukiman

| Indikator Kinerja | Tahun 2023 | | | Tahun 2024 | | |
|------------------------------------------|------------|-----------|---------|------------|-----------|---------|
| | Target | Realisasi | Capaian | Target | Realisasi | Capaian |
| Meningkatnya kualitas kawasan permukiman | 10 Ha | 83,53% | 101,51% | 10 Ha | 0 | 0 |

e. Sasaran Strategi 5 “Tersedianya sarana prasarana utilitas umum (PSU)”, dengan indikator kinerja sebagai berikut ini:

- 1) Persentase tersedianya prasarana sarana utilitas umum pada tahun 2023 mempunyai target 70% dengan realisasi capaian 70% dan pada tahun 2024 70% dengan capaian realisasi 70%.

Tabel 3.1.4.7. Tersedianya sarana prasarana utilitas umum (PSU)

| Indikator Kinerja | Tahun 2023 | | | Tahun 2024 | | |
|--------------------------------------------------|------------|-----------|---------|------------|-----------|---------|
| | Target | Realisasi | Capaian | Target | Realisasi | Capaian |
| Tersedianya sarana prasarana utilitas umum (PSU) | 70% | 70% | 100% | 70% | 70% | 70% |

3.1.5. Analisa Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan Kinerja serta Alternative Solusi yang telah dilakukan

Dokumen perjanjian kinerja tahun 2024 dilakukan pengukuran dengan membandingkan target dan realisasi yang telah dicapai. Kemudian hasil pengukuran kinerja tersebut dilakukan evaluasi dan analisa kinerja. Hal ini berguna untuk mengetahui keberhasilan maupun ketidakberhasilan pencapaian sasaran strategis.

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Pematangsiantar ada 5 Sasaran Strategis yang akan dicapai di tahun 2024 ini. Adapun 5 Sasaran Strategis tersebut sebagai berikut:

- a. Sasaran Strategis 1 “Meningkatnya jumlah rumah layak huni”, dengan indikator kinerja sebagai berikut :

1. Persentase ketersediaan rumah layak huni.

Capaian indikator persentase ketersediaan rumah layak huni pada tahun 2023 mempunyai target sebesar 82,29% dengan realisasi yang di capai 83,53% dan pada tahun 2024 dengan target sebesar 83,39% dengan capaian realisasi sebesar 83,39%.

Tabel 3.1.5.1. Persentase ketersediaan rumah layak huni

| Indikator Kinerja | Tahun 2023 | | | Tahun 2024 | | |
|------------------------------------------|------------|-----------|---------|------------|-----------|---------|
| | Target | Realisasi | Capaian | Target | Realisasi | Capaian |
| Persentase ketersediaan rumah layak huni | 82,29% | 83,53% | 101,51% | 83,39% | 83,39% | 100% |

2. Persentase rumah warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni dan persentase rumah warga Negara yang terkena relokasi akibat program pemerintahan daerah kab/ kota yang memperoleh pasilitas penyediaan rumah yang layak huni

Capaian indikator persentase rumah warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni dan persentase rumah warga Negara yang terkena relokasi akibat program pemerintahan daerah kab/ kota yang memperoleh pasilitas penyediaan rumah yang layak huni pada tahun 2023 mempunyai target sebesar 100% dengan realisasi yang di capai 100%, disebabkan pada tahun 2023 dan pada tahun 2024 dengan target sebesar 100% dengan capaian realisasi sebesar 100% disebabkan seluruh rumah yang terdampak bencana alam pada tahun 2024 telah mendapatkan bantuan rumah layak huni.

Tabel 3.1.5.2. Persentase rumah warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni dan persentase rumah warga Negara yang terkena relokasi akibat program pemerintahan daerah kab/ kota yang memperoleh pasilitas penyediaan rumah yang layak huni.

| Indikator Kinerja | Tahun 2023 | | | Tahun 2024 | | |
|---------------------------------------------------|------------|-----------|---------|------------|-----------|---------|
| | Target | Realisasi | Capaian | Target | Realisasi | Capaian |
| Persentase rehabilitasi rumah bagi korban bencana | 100% | 100% | 100 % | 100% | 100% | 100% |

b. Sasaran Strategis 2 “Meningkatnya sarana prasarana pelayanan air limbah domestik”, memiliki indikator kinerja sebagai berikut :

1. Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses layanan air limbah domestik layak

Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses layanan air limbah domestik layak pada tahun 2023 mempunyai target 100% dengan realisasi 100% dan pada tahun 2024 dengan target 100% dengan realisasi 100%.

Tabel 3.1.5.3. Persentase rumah yang terlayani sarana prasarana air limbah domestik

| Indikator Kinerja | Tahun 2023 | | | Tahun 2024 | | |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|---------|------------|-----------|---------|
| | Target | Realisasi | Capaian | Target | Realisasi | Capaian |
| Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses layanan air limbah domestik layak | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |

c. Sasaran Strategis 3 “Meningkatnya sarana prasarana pelayanan air bersih”, memiliki indikator kinerja sebagai berikut :

1. Persentase rumah yang terlayani sarana prasarana air bersih pada tahun 2023 mempunyai target 100% dengan realisasi capaian 0% dan pada tahun 2024 100% dengan capaian realisasi 100%. Target tersebut tidak tercapai karena keterbatasan anggaran dinas, sementara kota pematangsiantar tidak mendapat Dana Alokasi Khusus (DAK) dari kementerian terkait.

Tabel 3.1.5.4. Meningkatnya sarana prasarana pelayanan air bersih

| Indikator Kinerja | Tahun 2023 | | | Tahun 2024 | | |
|----------------------------------------------------|------------|-----------|---------|------------|-----------|---------|
| | Target | Realisasi | Capaian | Target | Realisasi | Capaian |
| Meningkatnya sarana prasarana pelayanan air bersih | 100% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% |

d. Sasaran Strategis 4 “Meningkatnya kualitas kawasan permukiman”, dengan indikator kinerja sebagai berikut ini:

1. Berkurangnya luasan kawasan kumuh/ berkurangnya RTLH. Pada tahun 2023 dinas perumahan dan kawasan permukiman tidak memiliki indikator kinerja ini sedangkan pada tahun 2024 mempunyai target berkurangnya luasan kawasan kumuh sebesar 10 Ha. Namun dinas perumahan dan kawasan permukiman tidak dapat menghitung capaian tersebut dikarenakan terdapat beberapa indikator dalam penuntasan kawasan kumuh yang tidak menjadi kewenangan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman antara lain Persampahan dan Penyediaan Hidran untuk Pemadam Kebakaran, sehingga capaian kinerjanya diintervensi dari berkurangnya rumah tidak layak huni (RTLH) di kota pematangsiantar yaitu sebanyak 29 Unit.

Tabel 3.1.5.5. Meningkatnya kualitas kawasan permukiman

| Indikator Kinerja | Tahun 2023 | | | Tahun 2024 | | |
|------------------------------------------|------------|-----------|---------|------------|-----------|---------|
| | Target | Realisasi | Capaian | Target | Realisasi | Capaian |
| Meningkatnya kualitas kawasan permukiman | 10 Ha | 83,53% | 101,51% | 10 Ha | 0 | 0 |

e. Sasaran Strategi 5 “Tersedianya sarana prasarana utilitas umum (PSU)”, dengan indikator kinerja sebagai berikut ini:

1. Persentase tersedianya sarana prasarana utilitas umum pada tahun 2023 mempunyai target 70% dengan realisasi capaian 70% dan pada tahun 2024 70% dengan capaian realisasi 70%.

Tabel 3.1.5.6. Tersedianya sarana prasarana utilitas umum (PSU)

| Indikator Kinerja | Tahun 2023 | | | Tahun 2024 | | |
|--------------------------------------------------|------------|-----------|---------|------------|-----------|---------|
| | Target | Realisasi | Capaian | Target | Realisasi | Capaian |
| Tersedianya sarana prasarana utilitas umum (PSU) | 70% | 70% | 100% | 70% | 70% | 70% |

Berdasarkan capaian kinerja Program, Alternatif Solusi yang dilakukan yaitu Upaya peningkatan Kinerja untuk Mengoptimalkan setiap sumber daya guna mewujudkan tujuan sasaran yang telah ditetapkan, dibutuhkan penganggaran yang relevan untuk mendukung Program dan Kegiatan dalam mewujudkan Visi dan Misi dan peningkatan koordinasi pelaksanaan Program dan Kegiatan pada setiap Jajaran Pemerintah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Pematangsiantar guna mewujudkan tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan.

Adapun Solusi Indikator Kerja yang tidak tercapai pada tahun 2024:

1. Persentase rumah tangga yang mendapat akses layanan air minum target 100% realisasi 0% dibutuhkan koordinasi pelaksanaan Program dan Kegiatan antar stake holder.
2. Berkurangnya luasan kawasan kumuh/ berkurangnya RTLH target 10Ha realisasi 0 maka dibutuhkan peningkatan sumber daya guna mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dan peningkatan koordinasi pelaksanaan Program dan Kegiatan pada setiap jajaran Pemerintah.

3.1.6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi merupakan salah satu parameter kinerja sehingga mampu menghasilkan output yang maksimal dengan input yang ada, sehingga analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dilihat dari 2 (dua) sudut pandang yaitu efisiensi penggunaan sumber daya anggaran daerah (belanja daerah) dan efisiensi penggunaan sumber daya manusia dalam hal ini Aparatur atau Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang melaksanakan tugas dan fungsi pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Pematangsiantar, pada tahun anggaran 2024 Anggaran Belanja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Pematangsiantar Rp. 38.492.228.815,- anggaran ini dipergunakan untuk menjalankan kinerja yang telah diperjanjikan pada awal tahun 2024 dan diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam rangka pencapaian visi dan Misi Kepala Daerah, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Pematangsiantar terdiri dari 6 program, 11 kegiatan dan 34 sub kegiatan yang dilaksanakan. Dari total anggaran tersebut, anggaran yang digunakan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman terealisasi sebesar Rp. 37.671.662.368,95 atau sebesar 97.87%. Hal ini dapat diartikan bahwa dalam menjalankan anggaran Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Pematangsiantar melakukan efisiensi anggaran sebesar 2,13%, efisiensi

penggunaan anggaran ini terjadi disebabkan anggaran yang diserap merupakan anggaran berbasis kinerja. Untuk melaksanakan program dengan menggunakan sumber daya anggaran yang ada, maka pelaksanaannya didukung oleh sumber daya Pegawai Negeri Sipil Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Pematangsiantar berjumlah 54 orang dan 43 THL. Dari kekuatan sumber daya manusia tersebut tingkat pencapaian sasaran strategis dengan seluruh indikator yang telah diperjanjikan sebesar 100%. Dari penjabaran diatas, kondisi tersebut masih dapat diartikan sebagai kondisi yang ideal karena pencapaian program dikategorikan sangat baik dengan memanfaatkan anggaran berbasis kinerja dan menggunakan sumber daya manusia yang ada. Keberhasilan ini akan dipertahankan sampai dengan berakhirnya RENSTRA 2022-2027.

Tabel 3.1.6.1. Realisasi Program Per Indikator Kinerja

| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | | Program/ Kegiatan | Anggaran | Realisasi | Capaian (%) |
|----|----------------------------------------------------|-------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------|
| 1 | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Prangkat Daerah | 1. | Nilai Akip Prangkat Daerah | Program penunjang urusan pemerintahan an daerah kab/kota | Rp. 24.946.222.455 | Rp. 24.225.164.284 | 97,10 |
| | | 2. | Indeks Kepuasan Masyarakat | | | | |
| | | 3. | Inovasi | Program peningkatan prasarana sarana dan utilitas umum | Rp. 50.000.000 | Rp. 49.950.000 | 100 |

| | | | | | | | |
|---|-----------------------------------------------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------|
| 2 | Meningkatnya Jumlah Rumah Layak Huni | 1. | Persentase Ketersediaan Rumah Layak Huni | Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh | Rp. 620.000.000 | Rp. 620.000.000 | 100 |
| | | 2. | Persentase Rumah Warga Negara Korban Bencana yang Memperoleh rumah layak huni dan persentase rumah warga Negara yang terkena relokasi | Program Pengembangan Perumahan | Rp. 300.000.000 | Rp. 298.393.000 | 99,46 |
| 3 | Meningkatnya sarana prasarana layanan air limbah domestik | 1. | Persentase rumah tangga yang mendapat layanan akses air limbah domestik | Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah | Rp. 6.045.266.000 | Rp. 6.039.510.306 | 99,90 |
| 4 | Meningkatnya sarana prasarana pelayanan air bersih | 1. | Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses layanan | Program pengembangan sistem penyediaan | 0 | 0 | |

| | | | | | | | |
|---|--------------------------------------------------|----|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------|-------------------|-------|
| | | | air minum layak | air minum (SPAM) di daerah kabupaten/ kota | | | |
| 5 | Meningkatkan kualitas kawasan permukiman | 1. | Berkurangnya luasan kawasan kumuh/ berkurangnya RTLH | Program kawasan permukiman | 0 | 0 | |
| 6 | Tersedianya sarana prasarana utilitas umum (PSU) | 1 | Persentase tersedianya prasarana sarana utilitas umum (PSU) | Program peningkatan prasarana sarana dan utilitas umum | Rp. 6.260.850.36 | Rp. 6.173.848.040 | 98,61 |

Tabel 3.1.6.2. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Anggaran

| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | | Kinerja | | | Anggaran | | |
|----|----------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------|--------------------|--------------------|-----------|--------------------|--------------------|-----------|
| | | | | Target | Realisasi | Capaian % | Target | Realisasi | Capaian % |
| 1 | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Prangkat Daerah | 1. | Nilai Akip Prangkat Daerah | Rp. 24.946.222.455 | Rp. 24.225.164.284 | 100 | Rp. 24.946.222.455 | Rp. 24.225.164.284 | 97,10 |
| | | 2. | Indeks Kepuasan Masyarakat | | | | | | |
| | | 3. | Inovasi | Rp. 50.000.000 | Rp. 49.950.000 | 100 % | Rp. 50.000.000 | Rp. 49.950.000 | 99,90 |
| 2 | Meningkatnya Jumlah Rumah Layak Huni | 1. | Persentase Ketersediaan Rumah Layak Huni | 83,39 % | 83,39 % | 100% | 10 unit | 29 unit | 290 |
| | | 2. | Persentase | 100% | | | 5 unit | 14 unit | 280 |

| | | | | | | | | | |
|---|----------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------|-----|------------------------------|--------------------------|-------|
| | | . | Rumah Warga Negara Korban Bencana yang Memperoleh rumah layak huni dan persentase rumah warga Negara yang terkena relokasi | | | | | | |
| 3 | Meningkatn ya sarana prasarana layanana air limbah domestik | 1 . | Persentase ruah tangga yang mendapat layanan akses air limbah domestik | Rp. 6.045.2 66.000 | Rp. 6.039. 510.30 6 | 100 | Rp. 6.045. 266.0 00 | Rp. 6.039.51 0.306 | 99,90 |
| 4 | Meningkatn ya sarana prasarana pelayanan air bersih | 1 . | Persentase ruamh tangga yang mendapatk an akses layanan air minum layak | | | | | | |
| 5 | Meningkatk an kualitas kawasan permukima n | 1 . | Berkurangny a luasan kawasan kumuh/ berkurangny a RTLH | | | | | | |
| 6 | Tersedianya sarana prasarana utilitas | 1 | Persentase tersedianya prasarana sarana | Rp. 6.260.8 50.36 | Rp. 6.173. 848.04 0 | 100 | Rp. 6.260. 850.3 6 | Rp. 6.173.84 8.040 | 98,61 |

| | | | | | | | | | |
|--|---------------|--|---------------------------|--|--|--|--|--|--|
| | umum (PSU) | | utilitas umum (PSU) | | | | | | |
|--|---------------|--|---------------------------|--|--|--|--|--|--|

Tabel 3.1.6.3. Efisiensi Per Indikator Kinerja

| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | | Capaian Kinerja (%) | Capaian Anggaran (%) | Efisiensi (%) |
|----|-----------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|---------------|
| 1 | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Prangkat Daerah | 1. | Nilai Akip Prangkat Daerah | 100 | 97,10 | 0 |
| | | 2. | Indeks Kepuasan Masyarakat | 83,03 | - | - |
| | | 3. | Inovasi | 100 | 99,90 | 0,1 |
| 2 | Meningkatnya Jumlah Rumah Layak Huni | 1. | Persentase Ketersediaan Rumah Layak Huni | 100 | 100 | 0 |
| | | 2. | Persentase Rumah Warga Negara Korban Bencana yang Memperoleh rumah layak huni dan persentase rumah warga Negara yang terkena relokasi | 100 | 99,46 | 0.54 |
| 3 | Meningkatnya sarana prasarana layanan air limbah domestik | 1. | Persentase rumah tangga yang mendapat layanan akses air limbah domestik | 100 | 99,90 | 0,10 |
| 4 | Meningkatnya sarana prasarana pelayanan air bersih | 1. | Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses layanan air minum layak | - | - | - |
| 5 | Meningkatkan kualitas | 1. | Berkurangnya | - | - | - |

| | | | | | | |
|---|--------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------|-----|-------|-----|
| | kawasan permukiman | | luasan kawasan kumuh/berkurangnya RTLH | | | |
| 6 | Tersedianya sarana prasarana utilitas umum (PSU) | 1 | Persentase tersedianya sarana prasarana utilitas umum (PSU) | 100 | 98,61 | 1,4 |

3.1.7. Analisis Program/ Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Adapun yang menjadi faktor pendorong keberhasilan dan kegagalan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Pematangsiantar dalam mencapai kinerja yaitu:

- a. Faktor Pendorong Keberhasilan dalam Pencapaian Kinerja
 1. Adanya dana yang diakomodir untuk meaksanakan kegiatan yang tercantum dalam DPA,
 2. Program dan Kegiatan yang terarah dari renstra sampai dengan PK dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Pematangsiantar
 3. Penambahan peralatan baru dalam rangka mendukung pelayanan publik
- b. Faktor Pendorong Kegagalan dalam Pencapaian Kinerja
 1. Realisasi kinerja keuangan pada pelaksanaan kegiatan/ sub kegiatan belum sesuai dengan rencana anggaran kas
 2. Pengendalian internal OPD belum dilaksanakan secara tertib dalam hal pengawalan terhadap capaian kinerja khususnya pada kinerja keuangan
 3. Belum tercapainya beberapa target sasaran kinerja prangkat
 4. Sarana dan prasarana yang masih terbatas sehingga kurang epektif untuk mendukung operasional Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Pematangsiantar

3.2. REALISASI ANGGARAN

Dinas perumahan dan kawasan permukiman kota pematangsiantar mengalokasikan belanja Operasional sebesar Rp. 33.747.670.436,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 33.028.632.009,- atau 97,87% dan Belanja Modal Sebesar Rp. 4.744.558.379,- dengan realisasi sebesar Rp. 4.643.030.359,95,- atau 97,86%. Secara keseluruhan didukung oleh 6 (enam) program dengan 10 (sepuluh) kegiatan, yaitu:

Tabel 3.2.1. REALISASI ANGGARAN PROGRAM/ KEGIATAN SERTA REALISASI ANGGARAN

| NO | PROGRAM | KEGIATAN/SUB KEGIATAN | ANGGARAN (Rp) | REALISASI (Rp) | SISA DANA | % | SUMBER DANA | KE T |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|--------------|---------------------|---------|
| | BELANJA OPERASIONAL | | 33.747.670.436 | 33.028.632.009 | 719.038.427 | 97,87 | DAU/ DAK | |
| I. | Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah UPTD | | 319.890.000 | 314.756.739 | 5.133.261 | 98,40 | DAU | |
| 1. | | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota Unit UPTD Pengelolaan Air Limbah Domestik | 319.890.000 | 314.756.739 | 5.133.261 | 98,40 | DAU | |
| | | 1. Peningkatan Instalasi Pengelolaan Lumpur Tinja (IPLT) | 319.890.000 | 314.756.739 | 5.133.261 | 98,40 | DAU | |
| | Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Dinas PKP | | 6.045.266.000 | 6.039.510.306 | 5.755.694 | 99,90 | DAK | |
| 1. | | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Dalam Daerah Kabupaten/Kota Unit Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kota Pematangsiantar | 6.045.266.000 | 6.039.510.306 | 5.755.694 | 99,90 | DAK | |
| | | 1. Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah | 6.045.266.000 | 6.039.510.306 | 5.755.694 | 99,90 | DAK | |

| | | | | | | | | |
|------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|--------------|------------|--|
| | | Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman | | | | | | |
| II. | Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | | 21.584.639.436 | 20.935.152.284 | 649.487.152 | 96,99 | DAU | |
| 1. | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 5.796.808.752 | 5.467.039.698 | 329.769.054 | 94,31 | DAU | |
| | | 1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 5.414.808.752 | 5.119.239.698 | 295.569.054 | 94,54 | DAU | |
| | | 2. Koordinasi dan Pelaksanaan Akutansi SKPD | 382.000.000 | 347.800.000 | 34.200.000 | 91,05 | DAU | |
| 2. | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 879.258.120 | 810.862.049 | 63.396.071 | 92,22 | DAU | |
| | | 1. Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor | 10.579.485 | 8.551.650 | 2.027.835 | 80,83 | DAU | |
| | | 2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 68.465.171 | 65.285.687 | 3.196.484 | 95,36 | DAU | |
| | | 3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 8.269.152 | 7.282.710 | 986.442 | 88,07 | DAU | |
| | | 4. Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 305.008.400 | 266.077.666 | 38.930.734 | 87,24 | DAU | |
| | | 5. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | 37.405.912 | 31.193.063 | 6.212.849 | 83,39 | DAU | |
| | | 6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 449.530.000 | 432.471.273 | 17.058.727 | 96,21 | DAU | |

| | | | | | | | | |
|------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|------------------|--------------|------------|--|
| 3. | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 14.410.432.564 | 14.179.836.392 | 230.596.172 | 98,40 | DAU | |
| | | 1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 13.964.497.564 | 13.734.468.392 | 230.029.172 | 98,35 | DAU | |
| | | 2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 445.935.000 | 445.368.000 | 567.000 | 99,87 | DAU | |
| 4. | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 498.140.000 | 477.414.145 | 20.725.855 | 95,84 | DAU | |
| | | 1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 57.630.000 | 42.415.502 | 15.214.498 | 73,60 | DAU | |
| | | 2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 295.910.000 | 293.887.343 | 2.022.657 | 99,32 | DAU | |
| | | 3. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 44.600.000 | 41.511.300 | 3.088.700 | 93,07 | DAU | |
| | | 4. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 100.000.000 | 99.600.000 | 400.0000 | 99,60 | DAU | |
| III. | Program Pengembangan Perumahan | | 300.000.000 | 298.383.000 | 1.617.000 | 99,46 | DAU | |

| | | | | | | | | |
|------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|--------------|------------|--|
| 1. | | Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/ Kota | 300.000.000 | 298.383.000 | 1.617.000 | 99,46 | DAU | |
| | | 1. Rehabilitasi Rumah Bagi Korban Bencana | 300.000.000 | 298.383.000 | 1.617.000 | 99,46 | DAU | |
| IV. | Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh | | 620.000.000 | 620.000.000 | - | 100 | DAU | |
| 1. | | Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota | 620.000.000 | 620.000.000 | - | 100 | DAU | |
| | | 1. Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di luar Kawasan Kumuh dengan Luas di bawah 10 Ha | 620.000.000 | 620.000.000 | - | 100 | DAU | |
| V. | Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) | | 4.877.875.000 | 4.820.829.680 | 57.045.320 | 98,83 | DAU | |
| | | Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan | 4.877.875.000 | 4.820.829.680 | 57.045.320 | 98,83 | DAU | |
| | | 1. Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Penunjang Fungsi Hunian | 4.877.875.000 | 4.820.829.680 | 57.045.320 | 98,83 | DAU | |

| | | | | | | | | |
|------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|--------------|------------|--|
| | BELANJA MODAL | | 4.744.558.379 | 4.643.030.359,95 | 101.528.019,05 | 97,86 | DAU | |
| I. | Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | | 3.361.583.019 | 3.290.011.999,95 | 71.571.019,05 | 97,87 | DAU | |
| | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 1.061.583.019 | 1.054.412.000 | 7.171.019 | 99,32 | DAU | |
| | | 1. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 1.061.583.019 | 1.054.412.000 | 7.171.019 | 99,32 | DAU | |
| | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 2.300.000.000 | 2.235.599.999,95 | 64.400.000,05 | 97,20 | DAU | |
| | | 1. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 2.300.000.000 | 2.235.599.999,95 | 64.400.000,05 | 97,20 | DAU | |
| II. | Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) | | 1.382.975.360 | 1.353.018.360 | 29.957.000 | 97,83 | DAU | |
| | | Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan | 1.382.975.360 | 1.353.018.360 | 29.957.000 | 97,83 | DAU | |
| | | 1. Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Penunjang Fungsi Hunian | 1.382.975.360 | 1.353.018.360 | 29.957.000 | 97,83 | DAU | |

BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dibuat sebagai bentuk pertanggungjawaban Kepala Daerah di bidang pemerintahan, dan pembangunan. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Pematangsiantar sebagai salah satu OPD yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan kepala daerah di bidang pembangunan wajib memberikan keterangan pertanggungjawaban alokasi anggaran yang telah dipergunakan.

Untuk kegiatan Fisik dan non fisik pada Tahun 2024 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Pematangsiantar mampu melaksanakan kegiatan dengan realisasi berkisar 97,87%

B. SARAN

Dengan terselesainya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) beberapa hal yang perlu disarankan adalah sbb:

1. Kegiatan yang dilaksanakan oleh setiap OPD merupakan kegiatan yang dilaksanakan berdasarkan tugas dan fungsi masing-masing OPD, agar kegiatan berjalan lancar dan tepat waktu maka pengesahan APBD untuk setiap tahunnya juga disamakan dengan awal tahun berjalan.
2. Pengesahan APBD di awal tahun diharapkan akan mempercepat realisasi fisik dan keuangan disetiap OPD.

Pematangsiantar,

2025.



KEPALA DINAS

Ir. Christina Risfani Sidaauruk

Pembina Tk. I

NIP. 19681227 199402 2 002